

LONGSOR TERUS-MENERUS TERJADI DI BANTUL

Rumah Ambrol Diterjang Material Tanah

DLINGO (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan ketika hujan deras disertai angin. Longsor terus-menerus di Dusun Ketos Sriharjo akhir pekan lalu dan Selasa (19/1) petang terjadi di Dusun Ngliseng Banjarharjo Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, menunjukkan potensi bencana alam tidak bisa dianggap remeh.



Lurah Muntuk Kapanewon Dlingo, Marsudi (kanan), menyerahkan logistik bagi korban longsor.

KR-Sukro Riyadi

Selain longsor, potensi bencana alam lain yang mesti diwaspadai ialah banjir. "Terkait tentang longsor di Bantul, di musim hujan seperti sekarang ini potensinya memang cukup tinggi. Kabupaten Bantul sisi timur sebagian pegunungan sehingga ketika intensitas hujan meningkat masyarakat berisiko terhadap bencana alam longsor," ujar Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryantom, Rabu (21/1).

Oleh karena itu, Dwi Daryanto berharap agar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di masing-masing kalurahan meningkatkan kewaspadaan. Warga terus diberikan edukasi serta langkah-langkah yang mesti diambil jika sewaktu-waktu terjadi hujan deras.

Lurah Muntuk Kapanewon Dlingo, Marsudi, mengatakan dari berbagai relawan ikut mengevakuasi korban tanah longsor. "Kemarin setelah kejadian korban kami ungsikan di tempat aman. Kemudian relawan melakukan evakuasi di lokasi longsor," ujar Marsudi.

Korban longsor saat ini membuntukkan tempat hunian sementara

menunggu program relokasi dari BPBD Bantul realisasi.

Sementara anggota Babbinkamtibmas Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, Brigadir Suratman SH, mengatakan longsor di Dusun Ngliseng terjadi menjelang senja. Sore itu hujan deras disertai hembusan angin cukup kencang. Ketika pemilik rumah Muridan sedang merebahkan badannya dikejutkan suara gemuruh dari belakang tempat tinggalnya.

Lelaki 40 tahun tersebut bergegas mencari asal suara mengerikan itu. "Setelah dicek, ternyata tebing belakang rumah setinggi sekitar 20 meter dan panjang 30 longsor telah menimpa 3 rumah sekaligus, satu rumah semi permanen," ujarnya.

Dijelaskan, dampak dari peristiwa tersebut dinding dua rumah bagian belakang roboh dan 1 rumah roboh total. "Dampaknya mengenai 2 kepala keluarga (KK) yakni Pak Amirudin dan Pak Muridan terdiri delapan jiwa," ujar Suratman. Langkah mencegah terjadinya longsor susulan sekitar lokasi kini dipasang terpal. (Roy)-f

KBM Daring Hindari Klaster Sekolah

BANTUL (KR) - Komisi D DPRD DIY tetap mendukung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) daring. Ini dilakukan sebagai antisipasi semakin meluasnya penyebaran penularan Covid-19 dan menghindari Klaster Sekolah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Umarudin Masdar SAG kepada KR, Rabu (21/1), menuturkan Komisi D yang salah satunya membidangi pendidikan, sementara waktu saat pandemi mendukung pembelajaran jarak jauh meski diakui penyerapan

pelajaran oleh siswa kurang maksimal.

"Tapi demi keselamatan bersama, hal tersebut harus dilakukan Dinas Pendidikan menunda pembelajaran tatap muka," jelasnya.

Terkait Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PT-KM), pihaknya mendukung langkah tersebut demi keselamatan masyarakat dari penularan Covid-19. Menurutnya, kebijakan PTKM di Jawa dan Bali, termasuk DIY merupakan langkah tepat untuk semakin mendisiplinkan masya-

rakat dalam menjalankan protokol kesehatan. "Harapannya dengan PTKM angka kasus Covid-19 menurun," paparnya.

Umarudin mengimbau masyarakat dapat mematuhi kebijakan PTKM. "Jika PTKM tidak dilakukan, dikhawatirkan lonjakan kasus jadi sangat tinggi dan rumah sakit tidak kuat menampung. Kondisinya bisa jadi sangat darurat. Kalau pengetatan tidak dari sekarang, kita khawatir kasus melonjak dan berimbas pada yang lain," tuturnya. (Aje)-f

27 Kalurahan Siapkan Shelter bagi OTG

BANTUL (KR) - Pemkab Bantul meminta tiap kalurahan untuk menyiapkan shelter isolasi. Shelter tersebut digunakan untuk menampung pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tapi orang tanpa gejala (OTG). Adapun saat ini dari 75 kalurahan sudah ada sekitar 40 persen atau 27 kalurahan yang telah menyiapkan shelter.

Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis, Rabu (20/1), mengatakan 27 kalurahan yang telah menyiapkan shelter tersebut tersebar di 8 kecamatan, antara lain Kecamatan Piyungan 1

kalurahan, Banguntapan 8 kalurahan, Sewon 3 kalurahan, Kasihan 4 kalurahan, Dlingo 6 kalurahan, Bambanglipuro 1 kalurahan, Kretek 1 kalurahan dan Kecamatan Sanden 1 kalurahan.

"Kendala kalurahan menyiapkan shelter yakni penetapan Anggaran Belanja Kalurahan sudah ditetapkan pada 2020. Sementara Surat Edaran permintaan shelter baru diterima Januari 2021, sehingga alokasi anggaran sudah telanjur untuk belanja lain," paparnya.

Dalam Surat Edaran No 443/00039/ADPEMDES dise-

butkan pemerintah kalurahan diminta membiayai operasional shelter, meliputi sarana dan prasarana, kebutuhan logistik, hingga pengelolaan limbah.

Helmi kemudian merekomendasikan supaya ada kerja sama dan melibatkan masyarakat. "Shelter tidak harus dibangun, tapi bisa memanfaatkan gedung mangkrak atau tempat sementara di fasilitas umum (fasum). Adapun fasilitas cukup dilengkapi dengan tempat tidur, air bersih, MCK dan tempat untuk berjemur atau berolahraga ringan," paparnya. (Aje)-f

'Human Error' Faktor Dominan Laka Lantas

BANTUL (KR) - Memasuki bulan Januari 2021, jumlah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) menunjukkan penurunan dari sisi kuantitatif dibandingkan bulan sebelumnya, Desember 2020. Namun, dari sisi kualitas justru terjadi peningkatan. Salah satu penyebabnya, pengendara sepeda motor maupun mobil memacu kecepatan lantaran situasi jalan dianggap 'sepi'.

Ketika terjadi lakalantas, akibatnya cukup fatal, yakni menyebabkan luka berat atau meninggal dunia pada diri yang mengalami laka lantas. Faktor dominan terjadinya lakalantas adalah human error (kelalaian manusia). Hal tersebut disampaikan Kanit Laka Satlantas Polres Polres Bantul, Iptu Maryana SH, Rabu (20/1), terkait evaluasi lakalantas di wilayah hukum Polres Bantul sejak diberlakukannya Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Kondisi jalan yang sepi terutama pada malam hari dan dinihari, menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, pengendara kendaraan bermotor memacu cepat laju kendaraannya dengan asumsi kondisi sepi tidak banyak pengendara lain. "Namun, ketika ada pengendara yang sama-sama ngebut dan terjadi kecelakaan, akibatnya bisa fatal," jelas Maryana.

Selain itu, masalah penggunaan helm

juga mempengaruhi ringan-beratnya risiko yang dialami korban ketika terjadi kecelakaan. Pengendara atau pembonceng yang tidak menggunakan helm risikonya akan lebih berat dibandingkan dengan yang menggunakan helm.

Karena itu, Maryana mengimbau setiap pengendara sepeda motor selalu menggunakan helm demi terjaganya keamanan.

Dalam kesempatan sama, Maryana menyampaikan pentingnya memperhatikan kelengkapan kendaraan bermotor, mulai dari lampu zign, lampu penerangan, lampu rem, kaca spion, dan stop lamp. Selain untuk kepentingan si pengendara sendiri, perlengkapan tersebut juga untuk kepentingan pengendara yang lain. Disampaikan, terkadang pengendara kurang memperhatikan masalah perlengkapan karena dianggap 'kurang penting'.

Maryana juga menjelaskan mengenai pentingnya cek kesehatan dan tes psikologi bagi setiap pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM). Disamping sehat jasmani, setiap pemohon SIM harus juga memenuhi kriteria sehat rohani yang dibuktikan dengan hasil tes psikologi. Sehat jasmani dan rohani bagi pengendara kendaraan bermotor penting terkait dengan stabilitas selama berkendara di jalan raya. (Hrd)-f

Pak Asmuni Menjawab

Fatwa MUI Tentang Label Halal (1)

TANYA:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang mengeluarkan fatwa atau label halal atas produk makanan, pengobatan dan kesehatan. Berkaitan dengan fatwa MUI tentang produk vaksin Covid-19, kami berharap kiranya Bapak bersedia menjelaskan tentang kewenangan tersebut, sehingga kami dapat memahaminya.

Cahyono, Bantul

JAWAB:

Makanan dan minuman sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, sehingga pemerintah RI berkewajiban membuat peraturan perundangan yang mewajibkan produsen melindungi para konsumen, khususnya bagi umat Islam. Untuk melindungi konsumen sekaligus melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman itu, dikeluarkan UU Nomor 23 tentang Kesehatan, UU Nomor 7/1996 tentang Pangan, UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

UU Nomor 8/1999 tentang perlindungan terhadap konsumen dirasa telah mengako-

modasikan kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hal itu karena dalam pasal 4 (a) disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang yang dimakan. Dengan demikian produsen wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen pada waktu memakannya.

Kehalalan barang itu termasuk dalam pasal 4 (c) yang bunyinya, "Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, berarti termasuk juga informasi tentang kehalalan suatu produk dan itu harus benar dan teruji lebih dulu".

Di Indonesia lembaga yang berkompeten untuk menguji adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Ketentuan ini berdasar pada SK Bersama antara Depkes dan Depag serta MUI yang diperkuat dengan keputusan Menkes Nomor 924 tahun 1996. Keputusan itu menunjuk LP MUI sebagai lembaga yang berhak menguji dan mengeluarkan sertifikat halal. □f



Redaksi:
Jl. Margo Utomo /
Jl. P. Mangkubumi 40-46
Yogyakarta 55232
redaksi@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 121)

Iklan :
iklan@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 129)

www.krjogja.com